

DIPLOMASI LUAR NEGERI & PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MARITIM INDONESIA

RUMUSAN MASALAH

bagaimana diplomasi luar negeri Indonesia dalam membangun poros maritim dunia sebagai wahana untuk meningkatkan konektivitas antarpulau dan antarnegara

MANFAAT PENELITIAN

sebagai bahan masukan bagi anggota DPR RI dari Komisi I, V, VII, dan KSAP

TEKNIK ANALISIS DATA

membuat catatan, memilih yang penting, menyajikan analisis, & menarik kesimpulan

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi diplomasi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita menjadi negara poros maritim dunia.
2. Menjelaskan peluang Indonesia dalam peningkatan konektivitas dengan negara-negara ASEAN.
3. Menganalisis manfaat pembangunan tol laut agar menguntungkan secara ekonomi dan strategis dalam persaingan kepentingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik
4. Menganalisis tantangan keamanan yang harus dihadapi pemerintah dalam menjamin keamanan pelayaran internasional.

DESAIN PENELITIAN

KUALITATIF

TEKNIK SAMPLING

purposive sampling

UNIT ANALISIS

Politik Luar Negeri Indonesia & Pembangunan Konektivitas Maritim

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

in depth interview & focus group discussion (FGD)

HASIL PENELITIAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pendekatan dengan negara-negara di kawasan Indo Pasifik untuk membuka peluang investasi asing. **PENDEKATAN BILATERAL** menjadi pilihan utama Presiden Joko Widodo. Kerjasama kemitraan antara dua negara dianggap sangat efektif untuk mengukur tingkat kemajuan kerjasama antarnegara. China, India, Korea Selatan, dan Jepang merupakan negara yang menjadi obyek kerjasama bilateral Indonesia.

Pendekatan lain yang digunakan adalah memberdayakan **KERJASAMA REGIONAL** melalui organisasi yang sudah terbentuk seperti ASEAN.

Tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan poros maritim dunia :

1. pembangunan infrastruktur pelabuhan yang belum selesai.
2. kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
3. ego sektoral yang masih dominan.
4. terbatasnya fasilitas listrik, telepon, dan air bersih.
pembebasan lahan yang terkendala hukum adat.
5. ketimpangan pembangunan antara Indonesia Barat-Timur sehingga kapal yang meninggalkan kawasan Indonesia Timur sering kosong.